



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
3. NHK : 110810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.699.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/140 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 163 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 504.000.000
3. Tanah Seluas 262 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 99 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 72.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 23.300.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 18.526.548

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.812.826.548

III. HUTANG

Rp. 662.032.381



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.150.794.167

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.